

RENCANA KERJA 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat



14F93E11A4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dokumen Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 telah selesai disusun.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 berpedoman Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2024 mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal dan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Guna menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Awal (Ranwal) rencana kerja tersebut.

Demikian, semoga dokumen Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat tahun 2024 ini dapat menghasilkan Perencanaan yang implementatif, akuntabel dan berorientasi kinerja untuk mendukung terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

Bandung, 11 Juli 2023
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.
Pembina Utama Madya



DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan hukum.....	2
1.3 Maksud dan tujuan.....	3
1.4 Sistematika penulisan	4
 Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (s.d. Triwulan II Tahun 2024)	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2024	19
 Bab III : Tujuan dan Sasaran Dispusipda	 23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispusipda Tahun 2024	24
3.3 Program dan Kegiatan Rencana Awal (Ranwal) Tahun 2024	24
 Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan	 36
4.1. Program dan Kegiatan Dispusipda Tahun 2024	36
 Bab V : Penutup	 45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Rencana Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Awal (Ranwal) Renja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat memandang perlu melakukan Rencana Awal (Ranwal) Renja Tahun 2024. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Rencana Awal (Ranwal) Renja Tahun 2024, yaitu :

- a. Percepatan pelaksanaan penyesuaian program/kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Awal (Ranwal) RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026.
- b. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran kegiatan, serta manfaat atau hasil dari pada kegiatan.
- c. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan Rencana Awal (Ranwal) Renja Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembngunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Awal (Ranwal) Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Awal (Ranwal) Daerah Provinsi Jawa Barat Rencana Awal (Ranwal) 2018-2023;



18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
28. Peraturan Gubernur Jabar Nomor 38 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jabar tahun 2024;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud penyusunan Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat adalah memberikan arahan bagi Bidang-Bidang dalam pencapaian program/kegiatan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.
- 1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja, untuk mencapai keharmonisan Perencanaan Dispusipa Provinsi Jawa Barat.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- 1.2. Landasan Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Tahun 2024
- 1.4. Sistematika Penulisan
Memuat sistematika penulisan Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Tahun 2024

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPUSIPDA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dispusipda Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat
Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispusipda
Menjelaskan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISPUSIPDA

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan pelaksanaan fungsi perpustakaan dan kearsipan
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Menjelaskan tujuan dan sasaran dengan Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Menjelaskan Program dan Kegiatan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPUSIPDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Rencana Awal (Ranwal) Renstra Dispusipda Tahun 2024-2026. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari dokumen Perencanaan jangka menengah tersebut disusun dokumen Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Tahun 2022 yang menetapkan 4 (empat) program terkait yang dilaksanakan melalui 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran menjadi Rp. 50.920.053.963,00.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dispusipda Provinsi Jawa Barat berperan sebagai perangkat Daerah yang menjalankan Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dan Program Pengelolaan Arsip yang dilaksanakan untuk mencapai target dari 6 (enam) indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Renstra Dispusipda Tahun 2024-2026.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada rencana kerja pada tahun 2024 untuk lebih akurasi terhadap koordinasi dan informasi upaya deteksi dini berbagai permasalahan maka perlu menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran yang diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dispusipda Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan angka capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 96,98%, Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 98,99%, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 99,39%, dan Program Pengelolaan Arsip sebesar 99,01% dari target yang telah ditentukan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Renstra Dispusipda s.d. Tahun 2022
Dispusipda Provinsi Jawa Barat

NO	KODE PROG/KEG			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN MURNI	BELANJA				KELUARAN							KET	
							Target s.d Desember		Realisasi s.d Desember		Deviasi s.d Desember	Output Kegiatan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Sampai Dengan Desember	Bobot (%)	Target s.d Desember		Realisasi s.d Desember			Deviasi s.d Desember
														Fisik	Fisik Tertimbang	Fisik	Fisik Tertimbang		
						Rp	%	Rp	%	%	%								%
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.23.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	50.942.279.506,00	50.942.279.506,00	100,00	49.405.151.488,00	96,98									
	2.23.01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Barat	150.870.175,00	150.870.175,00	100,00	148.009.500,00	98,10									
1	2.23.01	1.01	01	Sub Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Barat	150.870.175,00	150.870.175,00	100,00	148.009.500,00	98,10	(1,90)	- 8 Dokumen Perencanaan - 8 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	0,29	-	-	98,10	0,28	98,10	
	2.23.01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Barat	41.494.935.858,00	41.494.935.858,00	100,00	40.179.738.226,00	96,83									
2	2.23.01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jawa Barat	41.444.935.858,00	41.444.935.858,00	100,00	40.129.779.226,00	96,83	(3,17)	Jumlah Gaji dan Tunjangan 150 Pegawai	78,98	-	-	96,83	76,48	96,83	
3	2.23.01	1.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Jawa Barat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.959.000,00	99,92	(0,08)	16 Jumlah laporan akhir tahun	0,10	-	-	99,92	0,10	99,92	
	2.23.01	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Barat	53.400.000,00	53.400.000,00	100,00	53.241.600,00	99,70									
4	2.23.01	1.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Jawa Barat	53.400.000,00	53.400.000,00	100,00	53.241.600,00	99,70	(0,30)	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Kursus 30 Orang	0,10	-	-	99,70	0,10	99,70	
	2.23.01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Barat	1.641.927.362,00	1.641.927.362,00	100,00	1.622.499.966,00	98,82									
5	2.23.01	1.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jawa Barat	150.002.274,00	150.002.274,00	100,00	149.996.520,00	100,00	(0,00)	Alat-alat Listrik dan Penerangan 4 Paket	0,29	-	-	100,00	0,29	100,00	
6	2.23.01	1.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jawa Barat	366.357.196,00	366.357.196,00	100,00	352.498.417,00	96,22	(3,78)	- Alat Penanganan Covid-19 1 Set - Alat Tulis Kantor 4 Paket - Alat Kebersihan 4 Paket - Penyimpanan Data 20 Buah - Tinta Printer 160 Buah - Tinta Printer A0 2 Set - Tinta Printer A3 3 Set - Karangan Bunga 12 bulan	0,70	-	-	96,22	0,67	96,22	
7	2.23.01	1.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Jawa Barat	107.817.892,00	107.817.892,00	100,00	106.045.793,00	98,36	(1,64)	- Barang Cetakan 4 Paket - Buku Agenda 220 Buah - Kalender 220 Buah - Cetak Photo Kegiatan	0,21	-	-	98,36	0,20	98,36	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

8	2.23.01	1.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Provinsi Jawa Barat	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	32.325.700,00	89,79	(10,21)	Langganan Koran/Majalah 12 Bulan	0,07	-	89,79	0,06	89,79
9	2.23.01	1.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jawa Barat	981.750.000,00	981.750.000,00	100,00	981.633.536,00	99,99	(0,01)	- Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 8 Bulan - Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan - Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan - Perjalanan Dinas 12 Bulan	1,87	-	99,99	1,87	99,99
	2.23.01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Jawa Barat	205.558.950,00	205.558.950,00	100,00	196.562.206,00	95,62							
10	2.23.01	1.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Provinsi Jawa Barat	205.558.950,00	205.558.950,00	100,00	196.562.206,00	95,62	(4,38)	- AC Split 1 Unit - Alat Semprot 1 Unit - Dehumidifier 3 Unit - Harddisk External 1 Unit - SSD 15 Unit - Kolecer 4 Unit - Laptop 2 Unit - Mesin Potong Rumput 1 Unit - Portable Negative Film Scanner 4 Unit - Printer 5 Unit - Scanner ADF 5 Unit - Tangga Lipat 2 Unit - Thermohygrometer 5 Buah - Webcam 1 unit	0,39	-	95,62	0,37	95,62
	2.23.01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Barat	6.106.693.526,00	6.106.693.526,00	100,00	5.979.263.775,00	97,91							
11	2.23.01	1.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Jawa Barat	902.373.332,00	902.373.332,00	100,00	821.800.869,00	91,07	(8,93)	- Tagihan Telepon 12 Bulan - Tagihan Listrik 12 Bulan - Langganan Zoom 2 akun	1,72	-	91,07	1,57	91,07
12	2.23.01	1.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Jawa Barat	5.204.320.194,00	5.204.320.194,00	100,00	5.157.462.906,00	99,10	(0,90)	- Pembayaran Guru Ngaji 12 Bulan - Pembayaran Instruktur Senam 12 Bulan - Jasa Keamanan 12 Bulan - Jasa Kebersihan 12 Bulan - Tenaga Pengemudi 12 Bulan - Tenaga Teknis 12 Bulan - Pengolahan Sampah 12 Bulan - BPJS Pengemudi dan Tenaga Teknis 12 Bulan - Sewa Lapang Bulutangkis 12 Bulan - Tenaga Ahli Media Sosial 1 kegiatan	9,92	-	99,10	9,83	99,10
	2.23.01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Barat	1.288.893.635,00	1.288.893.635,00	100,00	1.225.836.215,00	95,11							
13	2.23.01	1.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan	Provinsi Jawa Barat	415.010.000,00	415.010.000,00	100,00	385.024.922,00	92,77	(7,23)	- Bahan Bakar Minyak 12 Bulan - Pembayaran Pajak Kendaraan 46 Unit - Service Kendaraan 46 Unit	0,79	-	92,77	0,73	92,77



14F93E11A4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	2.23.01	1.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jawa Barat	666.311.517,00	666.311.517,00	100,00	634.023.291,00	95,15	(4,85)	- Pemeliharaan AC 40 Unit - Pemeliharaan Eskalator 3 Unit - Pemeliharaan Genset 3 Unit - Pemeliharaan Jaringan Listrik 1 Kali - Pemeliharaan Komputer Unit - Pemeliharaan Printer Unit - Pemeliharaan Lift 4 Unit - Pemeliharaan Mesin Air 1 Kali - Pemindahan dan Pemasangan Roll O Pack 1 Pekerjaan - Pengendalian Hama 12 Bulan	1,27		-	95,15	1,21	95,15	
15	2.23.01	1.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Jawa Barat	207.572.118,00	207.572.118,00	100,00	206.788.002,00	99,62	(0,38)	- Penggantian Keramik 1 Pekerjaan - Perbaikan Fasilitas Gedung 1 Pekerjaan - Sewa Tanaman 12 Bulan	0,40		-	99,62	0,39	99,62	
	2.23.02			Program Pembinaan Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	656.549.285,00	656.549.285,00	100,00	649.949.001,00	98,99									
	2.23.02	1.01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	512.216.250,00	512.216.250,00	100,00	505.615.966,00	98,71									
16	2.23.02	1.01	02	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	174.375.000,00	174.375.000,00	100,00	174.238.500,00	99,92	(0,08)	-10 Kab/Kota Pelyanan Perpustakaan Keliling Area Publik	0,33		-	99,92	0,33	99,92	
17	2.23.02	1.01	04	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	60.713.000,00	60.713.000,00	100,00	60.713.000,00	100,00	0,00	Terlaksananya Pra akreditasi baik 210 Lembaga Perpustakaan sekolah Tingkat SMA se derajat	0,12		-	100,00	0,12	100,00	
18	2.23.02	1.01	08	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit	Provinsi Jawa Barat	26.898.000,00	26.898.000,00	100,00	26.737.265,00	99,40	(0,60)	Hasil Pengembangan Perpustakaan Deposit sebanyak 1 Laporan	0,05		-	99,40	0,05	99,40	
19	2.23.02	1.01	09	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Provinsi Jawa Barat	250.230.250,00	250.230.250,00	100,00	243.927.201,00	97,48	(2,52)	-Buku/Bahan Perpustakaan Digital Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat (CANDIL) sebanyak 170 Judul/630 Eksemplar - Buku/Bahan Perpustakaan Koleksi Kotal Literasi Cerdas (KOLECER) sebanyak 77 Judul / 322 Eksemplar - Pembangunan Aplikasi Wakaf Buku sebanyak 1 Aplikasi	0,48		-	97,48	0,46	97,48	
	2.23.02	1.02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	144.333.035,00	144.333.035,00	100,00	144.333.035,00	100,00									
20	2.23.02	1.02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	107.083.035,00	107.083.035,00	100,00	107.083.035,00	100,00	0,00	Terlaksananya Lomba Perpustakaan sekolah SMTA terbaik, Lomba Perpustades/Kel, lomba bertutur,pemilihan pustakawan berprestasi	0,20		-	100,00	0,20	100,00	
21	2.23.02	1.02	05	Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	37.250.000,00	37.250.000,00	100,00	37.250.000,00	100,00	0,00	Terpilihnnya Duta baca Tingkat Provinsi Jawa Barat	0,07		-	100,00	0,07	100,00	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

	2.23.03			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Provinsi Jawa Barat	42.871.750,00	42.871.750,00	100,00	42.611.866,00	99,39								
	2.23.03	1.01		Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	4.510.250,00	4.510.250,00	100,00	4.390.676,00	97,35								
22	2.23.03	1.01	01	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Provinsi Jawa Barat	4.510.250,00	4.510.250,00	100,00	4.390.676,00	97,35	(2,65)	Hasil Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebanyak 1 Laporan	0,01	-	-	97,35	0,01	97,35
	2.23.03	1.03		Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	26.175.000,00	26.175.000,00	100,00	26.175.000,00	100,00								
23	2.23.03	1.03	02	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Provinsi Jawa Barat	26.175.000,00	26.175.000,00	100,00	26.175.000,00	100,00	0,00	Jumlah Naskah Kuno yang di alih mediakan sebanyak 2 Naskah	0,05	-	-	100,00	0,05	100,00
	2.23.03	1.04		Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Provinsi Jawa Barat	12.186.500,00	12.186.500,00	100,00	12.046.190,00	98,85								
24	2.23.03	1.04	01	Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Provinsi Jawa Barat	12.186.500,00	12.186.500,00	100,00	12.046.190,00	98,85	(1,15)	Buku/Bahan Perpustakaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara sebanyak 35 Judul / 140 Eksemplar	0,02	-	-	98,85	0,02	98,85
	2.24.02			Program Pengelolaan Arsip	Provinsi Jawa Barat	830.570.644,00	830.570.644,00	100,00	822.341.608,00	99,01								
	2.24.02	1.01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis	Provinsi Jawa Barat	579.945.800,00	579.945.800,00	100,00	575.577.828,00	99,25								
25	2.24.02	1.01	01	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	Provinsi Jawa Barat	152.752.320,00	152.752.320,00	100,00	152.712.868,00	99,97	(0,03)	125 daftar -Rapat Pembahasan JRA 100 Orang -Rapat pembahasan pengelolaan arsip dinamis dan aplikasi kearsipan perangkat daerah 268 Orang -Rapat Pembahasan pengelolaan arsip dinamis BUMD 46 Orang -Rapat pembahasan SKKAAD 100 Orang -Rapat Pembahasan TD dan Klasifikasi Arsip 268 Orang -Rapat pembahasan Verifikasi LAKI Kabupaten/Kota 64 Orang, 268 Orang -Rapat Penyerahan hasil pengawasan kearsipan internal perangkat daerah dilingkungan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 100 Orang -Rapat Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat 100 Orang -Sosialisasi/Rapat Pembahasan alihmedia dan autentifikasi arsip 100 Orang	0,29	-	-	99,97	0,29	99,97



1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	2.24.02	1.01	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis	Provinsi Jawa Barat	427.193.480,00	427.193.480,00	100,00	422.864.960,00	98,99	(1,01)	-Jasa Tenaga Arsip 8 Orang -Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah 38 Perangkat Daerah	0,81	-	-	98,99	0,81	98,99	
	2.24.02	1.02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis	Provinsi Jawa Barat	209.999.844,00	209.999.844,00	100,00	206.897.280,00	98,52									
27	2.24.02	1.02	02	Sub Kegiatan Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Provinsi Jawa Barat	209.999.844,00	209.999.844,00	100,00	206.897.280,00	98,52	(1,48)	10 khasanah Monitoring Preservasi Arsip 27 Kab/Kota	0,40	-	-	98,52	0,39	98,52	
	2.24.02	1.03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Provinsi Jawa Barat	40.625.000,00	40.625.000,00	100,00	39.866.500,00	98,13									
28	2.24.02	1.03	02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	40.625.000,00	40.625.000,00	100,00	39.866.500,00	98,13	(1,87)	4 Titik simpul '10 Pembangunan Simpul SIKN/JIKN -6 Pembinaan Layanan Kearsipan	0,08	-	-	98,13	0,08	98,13	
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG		52.472.271.185,00	52.472.271.185,00	100,00	50.920.053.963,00	97,04	(2,96)		100,00	-	-	97,04	97,04	97,04	



Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja hingga Tahun 2022 menunjukkan 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat berkinerja cukup tinggi. Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya :

1. Efisiensi anggaran merubah Perencanaan penyerapan yang sudah direncanakan. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian belanja perangkat daerah. Sebagai usulan tindak lanjut, diharapkan agar proses efisiensi anggaran diberikan waktu yang cukup dan dilaksanakan pada hari kerja. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah penyusunan revisi perencanaan penyerapan anggaran yang sudah direncanakan sesuai hasil efisiensi oleh PPTK.
2. Lambatnya pengumpulan data penyerapan. Hal ini disebabkan ketidakdisiplinan dalam bekerja. Sebagai usul tindak lanjut perlu dilakukan percepatan pengumpulan data penyerapan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi internal dengan pengelola keuangan sebagai langkah antisipatif lambatnya pengumpulan dan penyerapan.
3. Terdapat keterlambatan dalam SPJ yang disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen pendukung SPJ. Sebagai usul tindak lanjut, perlu adanya bimbingan kepada para pengelola keuangan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan percepatan penyampaian dokumen SPJ secara lengkap yang sudah diteliti dan diperiksa oleh PPTK.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, maka perlu dilakukan percepatan untuk mencapai target Renja tahun 2024. Dari penelaahan yang dilakukan Tahun 2022 diperoleh rata-rata capaian program/kegiatan Dispusipda sebesar 97,04%, perlu menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Dispusipda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tugas Pokok Dispusipda Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, meliputi perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, bina perpustakaan dan budaya gemar membaca,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

pelayanan perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, serta pengelolaan arsip statis yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Dispusipda, meliputi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Uraian tugas pokok dan fungsi Dispusipda tersebut telah terakomodir dalam Indikator Kepala Dispusipda sehingga untuk memperoleh capaian kinerja pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat diukur melalui hasil pencapaian indikator Kepala Dispusipda setiap tahunnya dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Awal (Ranwal) Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, sebagaimana tabel 2.2. dibawah ini :



14F93E11A4

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	
1.	Indeks Membaca Masyarakat			68,5 Poin	69 Poin	62 Poin	63 Poin	61,49 Poin	61,49 Poin	64 Poin	
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			68,5 Poin	69 Poin	69 Poin	71 Poin	61,49 Poin	65,34 Poin	72 Poin	
3.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara tertib			52 Persen	59 Persen	30 Persen	45 Persen	11 Persen	57,89 Persen	60 Persen	
4.	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal			Kategori CC	Kategori CC	Kategori B	Kategori BB	Kategori CC	Kategori B	Kategori A	
5.	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis			31 Persen	34 Persen	48 Persen	68 Persen	3 Persen	48 Persen	88 Persen	
6.	Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis			31 Persen	35 Persen	35 Persen	50 Persen	66 Persen	35 Persen	65 Persen	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat apabila diukur secara kuantitas program dan kegiatan Dispusipda telah mencapai kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya peningkatan kualitas SDM Pustakawan dan Arsiparis.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispusipda adalah peningkatan IPLM (Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat) Provinsi Jawa Barat yang masih rendah. Hal ini merupakan tantangan untuk ditingkatkan di masa mendatang.

Namun demikian, Dispusipda memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan, yang ditinjau dari factor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi :

A. Kekuatan

1. Struktur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka kedudukan Dispusipda sebagai Dinas Teknis daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sama kedudukannya dengan dinas teknis daerah lainnya.

2. Cakupan Tupoksi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan meliputi Perpustakaan Deposit Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca, Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Dinamis serta Pengelolaan Arsip Statis yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Maka cakupan tupoksi Dispusipda Provinsi Jawa Barat meliputi urusan perpustakaan terdiri dari perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, perpustakaan sekolah/madrasah untuk melayani siswa dan siswi dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, badan



usaha milik daerah, lembaga pemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.

Urusan kearsipan mencakup seluruh pencipta arsip yaitu perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

3. Kompetensi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki cukup baik.

Dispusipda memiliki sumber daya manusia yang baik dan terlatih terdiri dari pejabat struktural dengan jenjang pendidikan setingkat S2-S3, pejabat fungsional pustakawan dan arsiparis yang profesional, berpengalaman, karena keberadaan pejabat fungsional pustakawan dan arsiparsi.

4. Cakupan Wilayah Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan perpustakaan dan kearsipan merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian urusan perpustakaan dan kearsipan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan dan kearsipan yang dibentuk sebagai dinas daerah provinsi, dan diselenggarakan juga oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dinas daerah kabupaten/kota, termasuk pemerintahan desa yang berada di wilayah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke kabupaten/kota sesuai dengan delegasi atau mandat dari pemerintah pusat.

5. Fasilitas Pelayanan Kinerja.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan, Daerah sudah memiliki sarana pelayanan kinerja meliputi;

Perpustakaan;

1. Gedung perpustakaan umum daerah provinsi Jawa Barat sebagai pusat sistem layanan perpustakaan berbasis TIK;
2. Layanan perpustakaan deposit koleksi Jawa Barat;
3. Mobil Perpustakaan keliling;
4. Motor baca;
5. Pusat kegiatan literasi masyarakat;
6. Koleksi Perpustakaan.
7. Pameran perpustakaan



Kearsipan:

1. Gedung depo arsip sebagai pusat penyimpanan arsip retensi 10 tahun milik pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Ruang Preservasi Arsip;
3. Mobil Perlindungan dan Penyelamatan arsip atau *mobil rescue arsip*;
4. Layanan perbaikan arsip yang rusak;
5. Mobil Sadar Arsip.
6. Publikasi kearsipan
7. Pelayanan arsip untuk masyarakat
8. Sistem Informasikan Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Simanis Juara

B. Kelemahan

1. Meskipun secara kualitas, SDM Perpustakaan dan Kearsipan sudah dapat diandalkan, tetapi secara kuantitas (jumlah) masih kurang mengingat cakupan wilayah kerjanya dan bobot berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan.
2. Untuk menyelenggarakan perpustakaan daerah sebagai perpustakaan deposit terutama untuk penyimpanan koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan oleh atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun diluar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok, termasuk pelestarian koleksi perpustakaan Jawa Barat, sampai saat ini, Dispusipda belum memiliki Gedung khusus untuk Perpustakaan Deposit;
3. Tingkat ketersediaan *records center* pada perangkat daerah selaku pencipta arsip belum merata dan belum berstandar.
4. Tingkat ketersediaan perpustakaan masih kurang.
5. Mutu ketersediaan arsip yang autentik belum dilengkapi dengan daftar arsip sesuai standard.

C. Peluang

1. Bidang perpustakaan sesuai dengan Rancangan Rencana RPJMN 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berperan strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, trampil dan berkarakter. Berkaitan dengan peran strategis perpustakaan tersebut, pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Tingkat ketersediaan perpustakaan untuk semua jenis perpustakaan di Jawa Barat masih dibutuhkan sebagai peluang dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Berdasarkan kondisi kependudukan yang akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, perpustakaan memiliki prospek yang sangat menggembirakan



untuk dikembangkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Bidang Kearsipan sesuai dengan Rancangan Rencana RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berperan strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berkaitan dengan reformasi birokrasi, salah satu area Rencana Awal (Ranwal)nya yaitu penguatan ketatalaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah, melalui pencapaian target-target yaitu meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di instansi pemerintah, kualitas pengelolaan arsip menjadi baik yang diukur melalui indeks pengawasan kearsipan sesuai Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Kearsipan dan museum secara simetris memiliki kesamaan fungsional antara arsip dan artefak yang ada di museum yaitu mengandung informasi tentang bukti atau bahan evidence tentang peristiwa, kejadian yang memiliki nilai informasi kesejarahan maka semestinya diselamatkan. Dan sejarah yang benar dan lengkap sangat penting dalam membangun kebudayaan dan peradaban suatu bangsa.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Kearsipan (TIK) untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara *stakeholder* sudah berjalan sangat baik dan terus untuk ditingkatkan.

D. Ancaman

1. Pengelolaan arsip yang baik pada masing-masing perangkat daerah masih belum semua dilaksanakan oleh para pejabat fungsional arsiparis atau pelaksana teknis kearsipan yang bersertifikat menyebabkan kualitas hasil kerja belum optimal dan belum dapat dijamin mutunya.
2. Kebijakan atau politik anggaran dalam perencanaan dan penganggaran bidang perpustakaan dan kearsipan yang belum stabil mendukung penuh urusan perpustakaan dan kearsipan.
3. Kelalaian pengelolaan arsip sebagai alat bukti serta sumber sejarah menyebabkan kehilangan arsip autentiknya.
4. Manajemen resiko bencana terhadap arsip dan bahan perpustakaan belum diperhatikan.
5. Masih ditemukan para pemustaka yang memiliki perilaku kurang baik/buruk dengan mengambil buku yang dipinjam yang menyebabkan koleksi buku sebagai aset berkurang/hilang.



E. Formulasi Isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk tahun yang direncanakan, isu isu penting yang dapat dijadikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti adalah:

- a. Pemerataan ketersediaan fasilitas membaca di ruang publik
- b. Peningkatan layanan perpustakaan bergerak (*mobile library*) untuk menjangkau pusat kegiatan masyarakat sampai ke pelosok desa.
- c. Pemberdayaan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui perpustakaan bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi social.
- d. Transformasi perpustakaan menjadi perpustakaan digital (*digital library*).
- e. Perlu terus meningkatkan jumlah bahan pustaka/buku untuk didistribusikan kepada perpustakaan-perpustakaan ditingkat provinsi sampai dengan tingkat pedesaan
- f. Penguasaan TIK oleh para pejabat fungsional pustakawan maupun pejabat fungsional arsiparis.
- g. Peningkatan mutu ketersediaan arsip yang autentik yang dilengkapi daftar arsip.
- h. Transformasi arsip konvensional menjadi arsip digital atau e-arsip.
- i. Penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai kesejarahan secara efektif.

Faktor eksternal meliputi :

A. Keluarga

Struktur sosial merupakan suatu hubungan antara individu dengan orang lain (masyarakat) untuk membentuk suatu norma, nilai, atau peraturan yang ada dalam suatu masyarakat sesuai dengan kepentingan bersama. Salah satu unsurnya adalah keluarga yaitu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Program Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca memiliki target diantaranya keluarga, karena untuk membangun minat dan kebiasaan membaca individu sangat besar pengaruhnya dari suatu keluarga. Oleh karena itu dengan adanya perpustakaan keluarga akan mampu membentuk insan yang memiliki budi pekerti, akhlak, kecerdasan yang baik.

B. Komunitas

Komunitas adalah suatu kelompok sosial disuatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya ikatan emosional, ketertarikan dan kebiasaan yang sama. Salah satu komunitas yang berkembang cukup baik di masyarakat yaitu komunitas bidang perpustakaan,



yang merupakan himpunan dari berbagai jenis perpustakaan dan perorangan yang mempunyai minat, perhatian, dan kepedulian pada perkembangan perpustakaan. Dengan demikian komunitas perpustakaan dapat menjadi ujung tombak terhadap pemberdayaan perpustakaan.

C. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan non formal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan. Pemberdayaan satuan pendidikan secara umum menjadi kewajiban pemerintah melalui kementerian pendidikan, dan atau dinas pendidikan pada pemerintahan daerah. Dan keberadaan perpustakaan pada setiap satuan pendidikan menjadi suatu unsur penting pada setiap penyelenggaraan satuan pendidikan.

D. Peraturan perundang-undangan tentang alat bukti

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah dipengadilan pidana terbagi menjadi :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dengan demikian surat atau arsip/dokumen sebagai bagian dari alat bukti hukum sah, maka ketersediaan arsip yang autentik merupakan tujuan yang harus dapat dicapai dalam penyelenggaraan kearsipan.

Berdasarkan pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 5 alat bukti dalam perkara perdata yaitu;

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dengan demikian surat atau arsip/dokumen sebagai bagian dari alat bukti hukum sah, maka ketersediaan arsip yang autentik merupakan tujuan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan kearsipan.

E. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance & Clean Governace*)) sudah menjadi agenda kerja pemerintah serta tercantum pada Rencana Jangka Menengah Daerah 2018 s.d. 2023. Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel



sangat diperlukan arsip/dokumen yang berfungsi sebagai evidence kinerja yang dapat diandalkan.

F. Kebudayaan

Kebudayaan dapat berfungsi sebagai identitas, jati diri, karakter suatu bangsa, sedangkan identitas, jati diri, karakter suatu bangsa dengan arsip memiliki hubungan yang bersifat simetris artinya sisi objek arsip dengan sisi objek identitas, jati diri, karakter suatu bangsa terdapat hubungan integral yang sama, seimbang dalam kerangka kerja (*frame work*) pembangunan kebudayaan.

Untuk menangani dan mengatasi isu-isu tersebut di atas perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik perangkat daerah maupun stake holder terkait perpustakaan dan kearsipan dan sinergitas antara Pusat, Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka peningkatan kualitas perpustakaan dan kearsipan tidak lepas dari peran seluruh stake holder (DPRD, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya). Data akurat dan akuntabel sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan.

2.4. Review Terhadap Rencana Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2024

Penelaahan terhadap Rencana Awal (Ranwal) RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dispusipda yang tercantum di dalam Rencana Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2024;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Dispusipda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Dispusipda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan program/kegiatan Dispusipda yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Perangkat Daerah sudah termuat dalam RKPD. Jika belum termuat dalam RKPD. Jika belum termuat, maka perlu membuat catatan penting.
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Dispusipda yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai.
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Dispusipda hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan.
7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.



Hasil telaahan terhadap 5 program, 18 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 55.567.049.574,00 dalam Rencana Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 15 kegiatan dari 15 kegiatan dalam Rencana Awal (Ranwal) RKPD tahun 2024 yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan yang ditujukan untuk ketercapaian *output* dan *outcome* kegiatan;
2. Jumlah kegiatan dan anggaran pada Rencana Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan tidak terdapat perbedaan (tercantum pada tabel 2.1);



14F93E11A4

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rencana Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2024
Dispusipda Provinsi Jawa Barat

NOMOR	RKPD 2024		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI Rp.	ANGGARAN (PERGESERAN) Rp.	ANGGARAN (RENCANA AWAL (RANWAL) Rp.	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.199.993.374	45.199.993.374	50.942.279.506	
	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.870.175	150.870.175	150.870.175	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.870.175	150.870.175	150.870.175	
	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.752.649.726	35.752.649.726	41.494.935.858	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.702.649.726	35.702.649.726	41.444.935.858	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
	1.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.400.000	43.400.000	53.400.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.400.000	43.400.000	53.400.000	
	1.04 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.750.029.470	1.750.029.470	1.641.927.362	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.002.274	150.002.274	150.002.274	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	366.357.196	366.357.196	366.357.196	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.720.000	107.720.000	107.817.892	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000	36.000.000	36.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.089.950.000	1.089.950.000	981.750.000	
	1.05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.076.506	194.076.506	205.558.950	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.076.506	194.076.506	205.558.950	
	1.06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.162.377.400	6.162.377.400	6.106.693.526	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.031.007.996	1.031.007.996	902.373.332	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.131.369.404	5.131.369.404	5.204.320.194	
	1.07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.590.097	1.146.590.097	1.288.893.635	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.010.000	415.010.000	415.010.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	545.070.097	545.070.097	666.311.517	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	186.510.000	186.510.000	207.572.118	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	656.549.285	656.549.285	656.549.285	
	2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	512.216.250	512.216.250	512.216.250	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

NOMOR	RKPD 2024		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI Rp.	ANGGARAN (PERGESERAN) Rp.	ANGGARAN (RENCANA AWAL (RANWAL)) Rp.	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	174.375.000	174.375.000	174.375.000	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	60.713.000	60.713.000	60.713.000	
	Pengembangan Perpustakaan Deposit	26.898.000	26.898.000	26.898.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	250.230.250	250.230.250	250.230.250	
2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	144.333.035	144.333.035	144.333.035	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	107.083.035	107.083.035	107.083.035	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	37.250.000	37.250.000	37.250.000	
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	42.871.750	42.871.750	42.871.750	
3.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	4.510.250	4.510.250	4.510.250	
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	4.510.250	4.510.250	4.510.250	
3.02	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	26.175.000	26.175.000	26.175.000	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	26.175.000	26.175.000	26.175.000	
3.03	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	12.186.500	12.186.500	12.186.500	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	12.186.500	12.186.500	12.186.500	
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	830.570.644	830.570.644	830.570.644	
4.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	579.945.800	579.945.800	579.945.800	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	152.752.320	152.752.320	152.752.320	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	427.193.480	427.193.480	427.193.480	
4.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	209.999.844	209.999.844	209.999.844	
	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	209.999.844	209.999.844	209.999.844	
4.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	40.625.000	40.625.000	40.625.000	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	40.625.000	40.625.000	40.625.000	
Total		46.729.985.053	46.729.985.053	52.472.271.185	

Sumber : Rencana Awal (Ranwal) RKPD 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI (PERPUSNAS) 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, dapat diketahui arah kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembangunan perpustakaan tahun 2024-2026.

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan perpustakaan tahun 2024-2026 yaitu :

1. Mengembangkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui (a) pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa, (b) peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif, (c) pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, (d) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, (e) perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dan (f) pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.
2. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui (a) peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi, (b) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan, (c) peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik, serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno melalui (a) konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno, (b) pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno.

Selanjutnya berdasarkan berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, posisi Arsip Nasional RI mendukung tercapainya 2 prioritas nasional yaitu (1) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan (2) Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong dan kerja sama antar warga mencakup peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip.

Dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral,



diperlukan program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik mencakup penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya melalui penerapan e-arsip terintegrasi, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Yang Ditindaklanjuti.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telah dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran Rencana Awal (Ranwal) Renja Dispusipda 2024 sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan menengah khusus;
2. Terwujudnya pemerintah daerah yang berkinerja

B. Sasaran

1. Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat.
2. Meningkatnya arsip perangkat daerah.
3. Meningkatnya ketersediaan sumber arsip kesejarahan.
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan public yang prima.

3.3. Program dan Kegiatan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis Dispusipda Tahun 2024-2026 yang secara simultan telah diubah sebagai tindak lanjut atas Rencana Awal (Ranwal) RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang difokuskan pada pendudukan terhadap 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Jawa Barat. Prioritas Pembangunan diterjemahkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program pembangunan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja ini, maka langkah selanjutnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian program dan kegiatan Dispusipda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 terdiri 5 program, 18 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan, antara lain :



Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Rencana Awal (Ranwal) Tahun 2024
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	Provinsi Jawa Barat	52.270.038.464	APBD Provinsi Jawa Barat
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja	100	Persen	Provinsi Jawa Barat	350.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	14	Dokumen	Provinsi Jawa Barat	350.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas laporan Keuangan	100	Persen	Provinsi Jawa Barat	40.045.635.370	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	orang	Provinsi Jawa Barat	39.895.635.370	APBD Provinsi Jawa Barat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16	Dokumen	Provinsi Jawa Barat	150.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Pendidikan	20	orang	Provinsi Jawa Barat	40.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	Provinsi Jawa Barat	40.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum Prengkat daerah	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	1.562.544.482	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Provinsi Jawa Barat	150.020.200	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Provinsi Jawa Barat	312.399.680	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	Provinsi Jawa Barat	121.180.262	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	Provinsi Jawa Barat	36.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	942.944.340	APBD Provinsi Jawa Barat
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	2.315.825.235	APBD Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	Provinsi Jawa Barat	31.356.390	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Provinsi Jawa Barat	100.100.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	350	Unit	Provinsi Jawa Barat	2.184.368.845	APBD Provinsi Jawa Barat
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	6,558,642,562	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	1.070.139.289	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	5.488.503.273	APBD Provinsi Jawa Barat
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	1.397.390.815	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	514.674.815	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2	Unit	Provinsi Jawa Barat	452.172.000	APBD Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			Dipelihara/Direhabilitasi					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	Unit	Provinsi Jawa Barat	430.544.000	APBD Provinsi Jawa Barat
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2) Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) Rasio Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (UPLM5) Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan (UPLM4)	1,49 0,0026 2,1986 0,4280	Poin Poin Poin Poin	Provinsi Jawa Barat	1,873,777,453	APBD Provinsi Jawa Barat
2.1	Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah perpustakaan yang dikelola	50	Unit	Provinsi Jawa Barat	1,573,407,700	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	80	Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	374.846.200	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengembangan Kekhasan	Jumlah koleksi	200	Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	13.672.000	



No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
		Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan					
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200	Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	150.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50	Orang	Provinsi Jawa Barat	85.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1	Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	86.229.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4492	Eksemplar	Provinsi Jawa Barat	721.766.500	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan	1	Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	141.894.000	APBD Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			Manajemen Layanan TIK					
2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat provinsi	4	Kegiatan	Provinsi Jawa Barat	300.369.753	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	4	Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	150.369.753	APBD Provinsi Jawa Barat
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	27	Lokus	Provinsi Jawa Barat	100.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	54	Orang	Provinsi Jawa Barat	50.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	25	Persen	Provinsi Jawa Barat	266.438.500	APBD Provinsi Jawa Barat
3.1.	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah KCKR Daerah yang dilestarikan	4400	Judul	Provinsi Jawa Barat	141.893.000	APBD Provinsi Jawa Barat



No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
		Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	3	Penerbit	Provinsi Jawa Barat	115.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	4400	Judul	Provinsi Jawa Barat	26.893.000	APBD Provinsi Jawa Barat
3.2.	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	3432	Entry	Provinsi Jawa Barat	31.719.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	5324	Naskah	Provinsi Jawa Barat	19.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	3432	Entry	Provinsi Jawa Barat	12.719.000	APBD Provinsi Jawa Barat
3.3.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan	1	Naskah	Provinsi Jawa Barat	78.053.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	25	Orang	Provinsi Jawa Barat	14.400.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan	2	Eksemplar	Provinsi Jawa Barat	63.653.000	APBD Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
		oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					
3.4.	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					Provinsi Jawa Barat	14.773.500	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100	Eksemplar	Provinsi Jawa Barat	10.684.250	APBD Provinsi Jawa Barat
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100	Eksemplar	Provinsi Jawa Barat	4.089.250	APBD Provinsi Jawa Barat
4.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	91	Persen	Provinsi Jawa Barat	571.425.507	APBD Provinsi Jawa Barat
4.1.	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Jumlah Arsip Dinamis yang di kelola	80	Daftar	Provinsi Jawa Barat	579.945.800	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip	38	Laporan	Provinsi Jawa Barat	96.974.800	APBD Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			Dinamis Kewenangan Provinsi					
		Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	10	Arsip	Provinsi Jawa Barat	138.507.920	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikas	125	Arsip	Provinsi Jawa Barat	18.184.320	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif)	76	Daftar	Provinsi Jawa Barat	192.604.667	APBD Provinsi Jawa Barat
4.2.	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					Provinsi Jawa Barat	125.153.800	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1500	Pengguna	Provinsi Jawa Barat	62.698.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	18	Laporan	Provinsi Jawa Barat	62.455.800	APBD Provinsi Jawa Barat
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	71	Persen	Provinsi Jawa Barat	585.369.650	APBD Provinsi Jawa Barat



No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dankesejahteraan rakyat					
5.1.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					Provinsi Jawa Barat	200.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	600	Arsip	Provinsi Jawa Barat	200.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
5.2.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota					Provinsi Jawa Barat	200.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2	Arsip	Provinsi Jawa Barat	200.000.000	APBD Provinsi Jawa Barat
5.3.	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					Provinsi Jawa Barat	185.369.650	APBD Provinsi Jawa Barat
		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan	3050	Arsip	Provinsi Jawa Barat	185.369.650	APBD Provinsi Jawa Barat



14F93E11A4

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Awal (Ranwal) 2024				
				Target Capaian Kinerja		Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					

Sumber : Dispusipda Provinsi Jawa Barat, diolah



14F93E11A4

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Dispusipda Tahun 2024 disusun untuk menindaklanjuti ditetapkan Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan capaian kinerja pembangunan daerah dan mendukung terhadap 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Jawa Barat yang selanjutnya Prioritas Pembangunan diterjemahkan ke dalam sasaran Prioritas Pembangunan melalui pelaksanaan program pembangunan.

Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Dispusipda Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2022 serta memperhatikan Rencana Awal (Ranwal) RKPD tahun 2024 terdapat kegiatan yang berubah anggarannya sebagaimana hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan agar ketercapaian output dan outcome kegiatan dapat dioptimalkan oleh Dispusipda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 55.567.049.574 seperti dapat disajikan pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1.
Program dan Kegiatan Rencana Awal (Ranwal) Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Sebelum Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Setelah Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Provinsi Jawa Barat	135.174.667.870	52.270.038.464	(83.004.629.406)	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja	100 Persen	Provinsi Jawa Barat	663.023.000	350.000.000	(313.023.000)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	14 Dokumen	Provinsi Jawa Barat	663.023.000	350.000.000	(313.023.000)	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan	100 Persen	Provinsi Jawa Barat	39.995.644.870	40.045.635.370	100.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 orang	Provinsi Jawa Barat	39.895.635.370	39.895.635.370	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Dokumen	Provinsi Jawa Barat	50.000.000	150.000.000	100.000.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 orang	Provinsi Jawa Barat	40.000.000	40.000.000	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Provinsi Jawa Barat	40.000.000	40.000.000	-	
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Prengkat daerah	12 Laporan	Provinsi Jawa Barat	1.676.000.000	1.562.544.482	(113.455.518)	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Paket	Provinsi Jawa Barat	160.000.000	150.020.200	(9.979.800)	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Sebelum Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Setelah Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Provinsi Jawa Barat	350.000.000	312.399.680	(37.600.320)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Provinsi Jawa Barat	130.000.000	121.180.262	(8.819.738)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Provinsi Jawa Barat	36.000.000	36.000.000	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Provinsi Jawa Barat	1.000.000.000	942.944.340	(57.055.660)	
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	Provinsi Jawa Barat	83.350.000.000	2.315.825.235	(81.034.174.765)	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Provinsi Jawa Barat	100.000.000	31.356.390	(68.643.610)	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Provinsi Jawa Barat	78.750.000.000	100.100.000	(78.649.900.000)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	350 Unit	Provinsi Jawa Barat	4.500.000.000	2.184.368.845	(2.315.631.155)	
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Provinsi Jawa Barat	7.500.000.000	6,558,642,562	(941.357.438)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Provinsi Jawa Barat	1.500.000.000	1.070.139.289	(429.860.711)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	Provinsi Jawa Barat	6.000.0000.000	5.488.503.273	(511.496.727)	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Setelah Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunlang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	1.950.000.000	1.397.390.815	(552.609.185)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Laporan	Provinsi Jawa Barat	750.000.000	514.674.815	(235.325.185)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	Provinsi Jawa Barat	750.000.000	452.172.000	(297.828.000)	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	Unit	Provinsi Jawa Barat	450.000.000	430.544.000	(19.456.000)	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2) Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) Rasio Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (UPLM5) Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan (UPLM4)	1,49 0,0026 2,1986 0,4280	Poin Poin Poin Poin	Provinsi Jawa Barat	12.399.640.000	173.777.453	(108.200.000,00)	
2.1	Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikelola	50	Unit	Provinsi Jawa Barat	11.349.640.000	1.573.407.700	(9.776.232.300)	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional	80	Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	728.064.000	374.846.200	(353.217.800)	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Sebelum Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Setelah Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket
		perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya						
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	200 Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	13.672.000	13.672.000	-	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	700.000.000	150.000.000	(550.000.000)	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	Provinsi Jawa Barat	700.000.000	85.000.000	(615.000.000)	
	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	616.759.000	86.229.000	(530.530.000)	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4492 Eksemplar	Provinsi Jawa Barat	5.684.000.000	721.766.500	(4.962.233.500)	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	2.566.145.000	141.894.000	(2.424.251.000)	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Sebelum Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Setelah Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket
2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat provinsi	4 Kegiatan	Provinsi Jawa Barat	1.050.000.000	300.369.753	(749.630.247)	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	4 Perpustakaan	Provinsi Jawa Barat	400.000.000	150.369.753	(249.630.247)	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	27 Lokus	Provinsi Jawa Barat	300.000.000	100.000.000	(200.000.000)	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	54 Orang	Provinsi Jawa Barat	350.000.000	50.000.000	(300.000.000)	
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	25 Persen	Provinsi Jawa Barat	423.353.000	266.438.500	(156.914.500)	
3.1.	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR Daerah yang dilestarikan	4400 Judul	Provinsi Jawa Barat	172.393.000	141.893.000	(30.500.000)	
	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	3 Penerbit	Provinsi Jawa Barat	26.893.000	115.000.000	88.107.000	
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah	4400 Judul	Provinsi Jawa Barat	145.500.000	26.893.000	(118.607.000)	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Sebelum Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Setelah Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket
	Karya Cetak dan Karya Rekam	Simpan KCKR						
3.2.	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	3432 Entry	Provinsi Jawa Barat	98.826.500	31.719.000	(67.107.500)	
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	5324 Naskah	Provinsi Jawa Barat	14.069.000	19.000.000	4.931.000	
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	3432 Entry	Provinsi Jawa Barat	84.757.500	12.719.000	(72.038.500)	
3.3.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan	1 Naskah	Provinsi Jawa Barat	127.093.000	78.053.000	(49.040.000)	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	25 Orang	Provinsi Jawa Barat	14.400.000	14.400.000	-	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	Provinsi Jawa Barat	112.693.000	63.653.000	(49.040.000)	
3.4.	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Provinsi Jawa Barat	25.040.500	14.773.500	(10.267.000)	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100 Eksemplar	Provinsi Jawa Barat	4.000.000	10.684.250	6.684.250	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Setelah Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100	Eksemplar	Provinsi Jawa Barat	21.040.500	4.089.250	(16.951.250)	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	91	Persen	Provinsi Jawa Barat	2.115.530.062	571.425.507	(1.544.104.555)	
4.1.	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Arsip Dinamis yang di kelola	80	Daftar	Provinsi Jawa Barat	1.490.407.862	579.945.800	(910462.062)	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	38	Laporan	Provinsi Jawa Barat	425.815.000	96.974.800	(328.840.200)	
	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	10	Arsip	Provinsi Jawa Barat	-	138.507.920	132.507.920	
	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikas	125	Arsip	Provinsi Jawa Barat	655.317.040	18.184.320	(637.132.720)	
	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif)	76	Daftar	Provinsi Jawa Barat	409.275.822	192.604.667	(216.671.155)	
4.2.	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				Provinsi Jawa Barat	125.153.800	125.153.800	-	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1500	Pengguna	Provinsi Jawa Barat	62.698.000	62.698.000	-	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Sebelum Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Setelah Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	18 Laporan	Provinsi Jawa Barat	62.455.800	62.455.800	-	
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dankesejahteraan rakyat	71 Persen	Provinsi Jawa Barat	450.000.000	585.369.650	135.369.650	
5.1.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi				250.000.000	200.000.000	50.000.000	
	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	600 Arsip	Provinsi Jawa Barat	250.000.000	200.000.000	50.000.000	
5.2.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	200.000.000	100.000.000	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	Provinsi Jawa Barat	100.000.000	200.000.000	100.000.000	
5.3.	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi				100.000.000	185.369.650	85.369.650	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Sebelum Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Setelah Rencana Awal (Ranwal) (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	3050 Arsip	Provinsi Jawa Barat	100.000.000	185.369.650	85.369.650	



14F93E11A4


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F93E11A4>

BAB V
PENUTUP

Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Awal (Ranwal) Renja Tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan Rencana Awal (Ranwal) kegiatan tahun 2024, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024.

Dalam Rencana Awal (Ranwal) Renja Tahun 2024, memuat program dan kegiatan Tahun 2024, baik yang mengalami Rencana Awal (Ranwal) maupun yang tidak mengalami Rencana Awal (Ranwal). Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2024 berupa kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami Rencana Awal (Ranwal) dan yang tidak mengalami Rencana Awal (Ranwal).

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.
Pembina Utama Madya

